

**TINJAUAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMK DALAM
PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN DI KPP PRATAMA
MAKASSAR SELATAN**

SRI LUTFIAH DARMAWATI

Program Studi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Makassar

Jl. A.P Pettarani Kampus Gunung Sari Baru Makassar

Email: srilutfiah12@gmail.com

SUMMARY

The purpose of this study was to determine the level of compliance of UMKM taxpayers in fulfilling their tax obligations. The variable of this research is the level of compliance of UMKM taxpayers in fulfilling tax obligations at the KPP Pratama South Makassar. The population of this study is the entire data of UMKM taxpayers registered at the KPP Pratama South Makassar, while the sample is the UMKM taxpayers data that reports at KPP Pratama South Makassar in the last 3 years, 2017 – 2019, which was taken with documentation and interview techniques. Data analysis was carried out by descriptive analysis.

Keywords: UMKM taxpayer compliance level in fulfilling tax obligations.

RINGKASAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Variabel penelitian ini adalah: tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam pemenuhan kewajiban perpajakan di KPP Pratama Makassar Selatan. Populasi penelitian ini adalah keseluruhan data wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan, sedangkan sampel adalah data wajib pajak UMKM yang melakukan pelaporan di KPP Pratama Makassar Selatan 3 tahun terakhir yaitu tahun 2017-2019 yang diambil dengan teknik dokumentasi, dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif.

Kata Kunci: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan pemasukan yang berperan penting untuk pembiayaan umum negara. Peranan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara terbesar dapat terlihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terutama untuk pembangunan nasional guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Sesuai dengan definisinya pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa sesuai dengan Undang-Undang. Akan tetapi sekarang ini masih banyak wajib pajak yang lalai dalam memenuhi kepatuhan wajib pajaknya.

Kepatuhan wajib pajak menjadi masalah penting yang harus dihadapi diseluruh dunia baik di negara maju maupun di negara berkembang terutama di Indonesia. Karena jika wajib pajak tidak patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran dan pelalaian dalam pembayaran pajak. Yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara berkurang.

Bentuk kepatuhan wajib pajak di bagi menjadi dua yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal terdiri dari mendaftarkan diri dan memiliki NPWP, menghitung dan membayar pajak yang terutang, melaporkan SPT baik SPT Masa maupun SPT Tahunan, membuat pembukuan, dan melakukan pemotongan atau pemungutan pajak. Sedangkan kepatuhan material Wajib Pajak membayar pajak terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan dan juga meliputi kepatuhan formal.

UMKM merupakan salah satu pelaku usaha yang menjadi wajib pajak yang dapat menambah penghasilan negara. UMKM juga merupakan salah satu wajib pajak yang dalam hal kepatuhan wajib pajak atau pembayaran pajaknya masih belum sebanding dengan usaha besar atau usaha menengah lainnya. Maka dari itu pemerintah mengatur kembali tarif pajak UMKM yang mana pada Tahun 2013 pemerintah juga membuat kebijakan pajak yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 yang diterapkan mulai 1 Juli 2013. PP tersebut memberikan tarif pajak sebesar 1% dari penghasilan wajib pajak yang tidak melebihi Rp 4,8 Miliar dalam satu tahun masa pajak. Sehingga pada bulan pada bulan Juli 2018 pemerintah meluncurkan kembali kebijakan baru tentang perpajakan UMKM yang tertuang dalam PP Nomor 23 Tahun 2018. Sedangkan untuk tarif pajak yang berlaku bagi UMKM dalam PP tersebut sebesar 0,5% dari penghasilan wajib pajak yang tidak melebihi Rp 4,8 M dalam satu tahun masa pajak dan mulai berlaku per 1 Juli 2018.

Dengan diberlakukannya PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang PPh Final atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu pemerintah berharap akan lebih memudahkan wajib pajak UMKM untuk memenuhi kepatuhannya sebagai wajib pajak dan diharapkan agar usahanya semakin berkembang sehingga dalam jangka waktu tertentu dapat menambah kontribusinya kepada negara melalui pajak.

Tabel 1 Jumlah Wajib Pajak dan Wajib Pajak yang Melakukan Pelaporan Pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan Tahun 2017-2019

Tahun	Wajib Pajak		Jumlah WP Terdaftar	WP UMKM yang Melakukan Pelaporan	Tingkat Kepatuhan (%)
	Badan	Orang Pribadi			
2017	1.324	4.836	6.160	5.550	90,1
2018	1.437	6.576	8.013	7.188	89,4
2019	1.652	7.156	8.808	8.052	91,4

Sumber: KPP Pratama Makassar Selatan

Berdasarkan data tabel 1 tampak jumlah wajib pajak yang melakukan pelaporan pajak di KPP Pratama Makassar Selatan pada tahun 2017 ketahun 2018 mengalami penurunan sedangkan pada tahun 2018 ketahun 2019 mengalami kenaikan dalam penyetoran pajaknya. Hal ini dapat terlihat dalam persentase kepatuhan wajib pajak UMKM pada tahun 2017 sebesar 90,1%, pada tahun 2018 sebesar 89,4%, dan pada tahun 2019 sebesar 91,4%. Pada tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami penurunan persentase tarif pajak UMKM yang di sebabkan karena pada tanpggal 1 Juli 2018 tarif pajak UMKM di ubah dari 1% menjadi 0,5% sedangkan untuk tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami kenaikan persentase wajib pajak, maka penulis tertarik mengadakan serangkaian penelitian dan memaparkan dalam penulisan tugas akhir ini dengan judul “TINJAUAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DALAM PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN DI KPP PRATAMA MAKASSAR SELATAN”.

METODE PENELITIAN

Definisi Operasional

Tingkat kepatuhan wajib pajak dimana kepatuhan wajib pajak terbagi menjadi dua yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Jika dilihat dari kepatuhan formal maka wajib pajak UMKM yang memiliki penghasilan tidak melebihi Rp 4,8 M dalam satu tahun masa pajak diwajibkan untuk mendaftarkan diri dan memiliki NPWP, menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya setiap bulan. Sedangkan untuk kepatuhan material memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan yang dapat meliputi kepatuhan formal.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan data wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan. Yakni pada tahun 2017 sebesar 6.160 wajib pajak UMKM yang terdaftar, tahun 2018 sebesar 8.013 wajib pajak UMKM yang terdaftar sedangkan untuk tahun 2019 sebesar 8.808 wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan, sampel yang diangkat dalam penelitian ini adalah data wajib pajak UMKM yang melakukan pelaporan di KPP Pratama Makassar Selatan pada tahun 2017 sebesar 5.550 orang, tahun 2018 sebesar 7.188, dan tahun 2019 sebesar 8.052 orang.

Teknik Pengumpulan Data Dan Analisis Data

Dalam penulisan ini teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi yaitu mengumpulkan data seperti bukti dan

dokumen yang mendukung penelitian diperoleh dari KPP Pratama Makassar Selatan. Datanya berupa seluruh wajib pajak UMKM yang terdaftar, menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya di KPP Pratama Makassar Selatan. Sedangkan Wawancara yaitu melakukan dialog secara langsung dengan responden (pegawai KPP Pratama Makassar Selatan Sub Bagian Umum) untuk memperoleh informasi atau data dari responden terpilih untuk menghimpun informasi secara luas dan relevan mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, data-data yang diperoleh dianalisis sesuai dengan prosedur atau metode yang telah ditetapkan. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian akan dibandingkan dengan teori yang telah dipelajari selama perkuliahan. Kemudian dilakukan pengelolaan data untuk mendapatkan hasil kesimpulan.

1. Dimulai dengan mengumpulkan data jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar pada KPP Pratama Makassar Selatan dari tahun 2017 sampai 2019.
2. Mengambil data wajib pajak UMKM sesuai dengan kepatuhan wajib pajak secara formal yaitu mendaftar, menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya.
3. Menghitung persentase pelaporan wajib pajak UMKM dalam kepatuhan wajib pajaknya.
4. Mengambil kesimpulan antara dokumentasi dengan wawancara yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah wajib pajak yang terdaftar dari tahun 2017 sampai tahun 2019 di KPP Pratama Makassar Selatan semakin meningkat di karenakan adanya kesadaran dari masyarakat yang telah memnuhi kriteria wajib pajak UMKM serta adanya pengurangan tarif pajak UMKM.. Pada tahun 2017 sebanyak 6.160 Wajib Pajak dengan persentase 37,1%, tahun 2018 sebanyak 8.013 wajib pajak dengan persentase 37,3%, dan tahun 2019 sebanyak 8.808 wajib pajak dengan persentase 35,0%. Dari peningkatan tersebut dapat terlihat bahwa masyarakat semakin sadar untuk mendaftarkan diri ke KPP serta memenuhi kewajibannya membayar pajak

Dari tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami penurunan tingkat kepatuhan formal wajib pajak UMKM yaitu sebesar 0,2%. Dari tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami peningkatan tingkat kepatuhan formal wajib pajak UMKM yaitu sebesar 3,3%. Meningkatnya kepatuhan formal tersebut menggambarkan bahwa masyarakat semakin sadar akan kewajiban pajaknya yaitu mendaftarkan diri di KPP apabila wajib pajak tersebut sudah memenuhi kriteria wajib pajak UMKM.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Sesuai dengan data yang diperoleh peneliti jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan dari tahun 2017-2019 mengalami peningkatan dengan kata lain adanya kesadaran diri dari masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajaknya.
2. Jumlah wajib pajak yang melakukan pelaporan di KPP Pratama Makassar Selatan dari tahun 2017-2019 mengalami penurunan. Pada tahun 2017 persentase wajib pajak UMKM yang melakukan pelaporan sebesar 37,1%, hal ini diambil dari jumlah wajib pajak UMKM yang melakukan pelaporan dibagi dengan jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar di tahun 2017. Pada tahun 2018 persentasenya naik menjadi 37,3%, hal ini diambil dari jumlah wajib pajak UMKM yang melakukan pelaporan dibagi dengan jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar di 2018. Untuk tahun 2019 persentasenya menurun ke angka 35,0%, hasil ini diambil dari jumlah UMKM yang melakukan pelaporana dibagi dengan jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar.
3. Beberapa faktor atau alasan wajib pajak yang belum melaporkan pajak atau menyampaikan SPT Tahunan serta memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya yaitu seperti wajib pajak lupa waktu pelaporan, kurangnya sarana yang dimiliki wajib pajak, wajib pajak kurang memahami dan sadar atas kewajibannya untuk membayar dan melaporkan pajaknya.

Setelah meninjau permasalahan yang ada tentang tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

- 1) Meningkatkan pelayanannya terhadap publik dan mengadakan sosialisasi pajak kepada masyarakat secara intensif agar masyarakat mengetahui dan paham tentang kewajiban pajaknya dapat melalui talkshow, media masa, media elektronik serta spanduk atau membagikan brosur kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan masih banyak wajib pajak yang lalai atau belum memiliki kesadaran dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

2. Manfaat Teoritis

- 1) Disarankan bagi peneliti lain agar dapat melakukan penelitian terhadap tingkat kepatuhan material wajib pajak UMKM.
- 2) Untuk meneliti tingkat kepatuhan material agar melakukan survei untuk memilih salah satu kecamatan atau apapun itu yang kurang lebih memiliki banyak UMKM dan membandingkan jumlah data yang anda dapatkan dari survei dengan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil, dan Menengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, D. T. (2017). *Strategi Internasionalisasi UMKM*. Makassar: CV. Sah Media.
- Lubis, R. H. (2018). *Pajak Penghasilan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nurmantu, S. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Pandiangan, L. (2014). *MudahPnya Menghitung Pajak UMKM*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Pertiwi, L. K. (2015). Efektifitas Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Menyampaikan SPT Tahunan Badan Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan PPh Badan. *Skripsi*. Universitas Darma Persada, Jakarta.
https://www.slidedhare.net/mobile/Uofa_Unsada/2011420034-larasati-kencana-pertiwi
- Perturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Tentang PPh Final.*
- Pohan, D. A. (2014). *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Sudaryono. (2017). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Surat Ederan Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-18/PJ.22/2006
- Syafi'i. (2012). Kajian Empiris Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Penyebabnya. *Skripsi*. Universitas Bhayangkara Surabaya.
- Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007.*
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008.*
- Widodo, W. dkk. (2010). *Moralitas Budaya, dan Kepatuhan Pajak*. Bandung: Alfabeta.